

# KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

**Nur Afni, Mohammad Reza, Labandingi Latoki**

## *Abstract*

*One of the important elements in human development is economic growth that is equitably distributed between generations, between ethnicities, between genders, and between regions. One of the dimensions emphasized is the existence of gender equality. This dimension is also one of the development commitments and gender inequality that occurs in various parts of the world. Development in principle must provide justice and prosperity to all people, to men and women, to the rich and the poor. The current fact is that development has sharpened the gap in social justice between the poor and the rich, between women and men, between the ruling group and the common people. This can be seen from the existence of gender inequality in development.*

***Keywords: Gender Equality, Community Economic Development and Empowerment***

## **PENDAHULUAN**

Masih banyak orang yang belum bisa membedakan secara jelas antara pengertian istilah jenis kelamin dan gender, sehingga tidak jarang kedua terminologi tersebut dianggap sama secara konseptual. Anggapan ini tentu tidak tepat, sebab istilah jenis kelamin dan gender memiliki pengertian yang sama sekali berbeda<sup>1</sup>

Dalam kajian gender, hal penting yang perlu dilakukan sebelum membahas lebih lanjut adalah memahami terlebih dahulu perbedaan konsep gender dan seks (jenis kelamin). Kesalahan dalam memahami makna gender

---

<sup>1</sup>Agung Setiyawan, *Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, Jurnal Pendidikan Islam: Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436, 245-265.

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit untuk bisa menerima analisis gender dalam memecahkan masalah ketidakadilan sosial. Jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan.<sup>2</sup> Menurut Mansoer Faqih, *sex* berarti jenis kelamin yang merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Perbedaan anatomi biologis ini tidak dapat diubah karena bersifat menetap, ia merupakan kodrat dan tidak dapat ditukar, oeh karena itu perbedaan tersebut berlaku sepanjang zaman dan dimana saja.<sup>3</sup>

Dalam 20 tahun terakhir, ada banyak diskusi tentang kesetaraan gender. Diskriminasi perempuan telah melalui perjalanan panjang dan perjuangan di seluruh dunia. Diskriminasi terjadi semata-mata karena perbedaan gender dan peran sosial (gender).

Pria dan wanita secara biologis berbeda (perbedaan alami). Perbedaan kodrat ini, yaitu perbedaan gender, merupakan anugerah dari Tuhan. Namun, ada perbedaan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti ketidaksetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman tentang perbedaan antara perbedaan yang wajar dan tidak wajar. Perbedaan peran dan fungsi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan disebut sebagai perbedaan yang tidak wajar atau perbedaan sosial. Perbedaan tersebut muncul sebagai akibat dari proses

---

<sup>2</sup>Muh. Sabilar Rosyad, *Analisis Buku Bahas Arab Siswa Kelas VIII MTs/SMP Islam Dalam Perspektif Gender*, JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education Volume 02, Nomor 02, September 2018; p-ISSN: 2549-7804; e-ISSN: 2549-8622; 381-39.

<sup>3</sup>Susi Indrayati, *Mendudukan Wacana Gender (Dari Kesalahpahaman Menuju Pemahaman)*, MUWAZAH, Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2012, 169-188.

sosialisasi atau pendidikan di semua institusi (keluarga, pendidikan, agama, adat, dan sebagainya) dari mana pemahaman gender muncul.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sebuah pertanyaan reflektif yang dimunculkan dalam pembahasan ini adalah mengapa kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam dunia ekonomi, pertanyaan sederhana ini, tidaklah mudah untuk dicarikan jawabannya. Sebab mengandung konsekwensi logis yakni keniscayaan untuk menentang gelombang arus balik yang justru bias sangat besar datang dari kelompok-kelompok yang menyokong keamanan dominasi budaya patrialkhal dan peradaban maskulin yang memang telah menjadi paradigma baku dan absolut. Padahal kalau dikaji secara serius belum tentu hal itu benar, apa lagi jika dikaitkan dengan masalah ekonomi dan pembangunan.

Para penganut mazahab feminisme dalam memperjuangkan misi kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan di sekolah, perlu ada perhatian secara lebih baik untuk menghadapi arusbalik tersebut. Penyokong keamanan didominasi budaya maskulin, mereka diniscayakan akan tampil paling depan dan menjadi lokomotif dari gagasan-gagasan alternatif dan segar untuk keberhasilan “misi suci” dalam menggaungkan misi utama kemanusiaan yang sesungguhnya dalam soal relasi yang beratribut gender, antara perempuan dan laki-laki, kerjanya dituntut kemampuannya dalam merajut gagasan-gagasan dalam wacana pendidikan.<sup>5</sup>

Secara terminologis, makna jenis kelamin (*sex*) didefinisikan sebagai perbedaan fisik berdasarkan anatomi biologis manusia, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Berdasarkan perbedaan fisik dan biologis ini, ada dua jenis kelamin manusia: laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, fungsi alami dari organ reproduksi membedakan laki-laki dan perempuan. Karena didasarkan

---

<sup>4</sup>Dedi Wahyudi Dkk, *Diskursus dan Penguatan Gender Dalam Pendidikan Islam*, JSGA Vol. 02 No. 02 Tahun 2020, 52-67.

<sup>5</sup>Wirasandi, *Wanita Dalam Pendekatan Feminisme*, Journal Ilmiah Rinjani\_Universitas Gunung Rinjani, Vol. 7 No.2 Tahun 2019, 47-58.

pada perbedaan gender alami yang berlaku secara universal untuk semua wanita dan pria di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Sedangkan gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>7</sup> Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin*.<sup>8</sup> Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Oleh karena itu pengertian gender semacam ini dapat berubah dari tempat ketempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan, sedangkan gender sebagai status merupakan hal yang diterima atau diperoleh. Mufidah dalam Paradigma Gender, sebagaimana dikutip oleh Nazaruddin<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat

---

<sup>6</sup>Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, Jurnal Civics Vol. 4 No. 2 Desember 2007, 68-77

<sup>7</sup>Hermanto, *Proses Pembelajaran Quantum Teaching Dalam Bahasa Inggris Pada Kelas Co-Education Berbasis Adil Gender*, Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017 P-ISSN: 1412-2715, E-ISSN: 2616-4412 , 458-468.

<sup>8</sup>Anita rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, Palastren Vol. 8 No. 1 Juni 2019, 1-34.

<sup>9</sup>Qurrotul Ainiyah, *Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Gender*, <http://ejournal.kopertais4.or.id> > article, Diakses 25 Mei 2022

<sup>10</sup>Nazaruddin, *Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015, 222-236.

sosial yang lebih egaliter.<sup>11</sup> Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki, hanya saja, yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang ekonomi karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menganalisis terkait bagaimana konsep kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

## PEMBAHASAN

### Pengertian Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, Gender berarti jenis kelamin”<sup>12</sup>. *Webster’s New World dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>13</sup> Didalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep *cultural* yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup> Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal “*sex and gender*” mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya

---

<sup>11</sup>Novita Wahyu Setyawati dan Endah Prawesti Ningrum, *Peran Gender Dalam Pengambilan Keputusan Pada Era Reformasi Di Institusi Kepolisian*, JURNAL M-PROGRESS Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 49-58.

<sup>12</sup>Anistasya Mokodompis, *Skripsi: Analisis Kosakata Yang Berhubungan Dengan Gender Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Sangir ((Suatu Analisis Kontrastif)*, (Manado, UNSRAT, 2020).

<sup>13</sup>Nur Syamsiah, *Wacana Kesetaraan Gender, Sipakalebbi’*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 265-301.

<sup>14</sup>Rusdi Zubeir, *Gender Dalam Perspektif Islam*, AN NISA'A, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2012: 103 – 118.

terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expectation for Woman and Men*).<sup>15</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda I. Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seorang sebagai laki laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. Secara leksikal, gender merupakan identitas atau penggolongan gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya.<sup>16</sup>

Penggolongan ini secara garis besar berkaitan dengan dua jenis kelamin yang masing-masing sering di golongkan dalam ketegori fememim dan maskulin, sedang secara terminologi, gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual.<sup>17</sup> Perbedaan yang dimaksud adalah dalam ranah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Analisis perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya secara biologis tetapi perlu pengkajian secara non biologis, yakni kajian gender. Kajian gender ini merupakan suatu upaya untuk memahami interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.

### **Teori Yang Relevan Tentang Gender**

Persepsi masyarakat tentang gender muncul dalam berbagai pandangan. Pandangan secara umum menyatakan bahwa perbedaan sifat, posisi, dan peranan tara laki-laki dan perempuan merupakan suatu keniscayaan dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun demikian masi banyak diantara masyarakat belum memahami secara jelas, apa dan bagaimana gender yang sebenarnya dan apa yang

---

<sup>15</sup>Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, *Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, 409-432.

<sup>16</sup>M. Hajir Mutawakkil, *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*, UNIDA Gontors Journal, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, 68-89.

<sup>17</sup>Illich Ivan, *Matinya Gender* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), 58.

<sup>18</sup>Dzuhayatin siti Zuhaeni, *Idiologi Pembebasan perempuan Perpektif Femenisme Dalam Islam yang dilansir* oleh Binar, Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan (Jakarta: Cides Ui, 1998), 11.

diharapkan dari adanya peran gender tersebut, untuk lebih mengenal peran antara laki-laki dan perempuan sdalam konsep gender, dapat dilihat dari beberapa teori gender sebagai berikut:

1. Teori Kodrat Alam (*Nature*)

Menurut Kamla Bhasin, mengemukakan bahwa namanya teori kodrat alam, tentu saja cara memandangnya berdasarkan dengan kejadian-kejadian yang alamiah, dimana peran antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang melekat dan tidak mudah untuk di ubah. “selama berabad-abad diyakini bahwa sifat, peran sosial antara laki-laki dan perempuan biasa ditentukan oleh faktor biologis<sup>19</sup> Terlahir dari faktor biologis antara laki-laki dan perempuan, maka harus diterima sebagai kodrat yang dirtentukan oleh Allah swt.

Sebagai ciptaan Allah yang berbeda, dalam pandangan masyarakat apabila ada yang dipertukarkan antara satu dengan yang lain, terutama dalam perannya, maka itu telah menantang kodratnya sebagai ciptaan Allah swt, dan hal itu sangat tidak diperbolehkan.<sup>20</sup> Jika dipertukarkan peran antara laki-laki dan perempuan, maka masyarakat tidak akan menerima atau mencaci maki, misalnya jika ada seorang laki-laki yang sifatnya feminin, oleh masyarakat langsung di beri gelar yang kurang baik (banci). Sebaliknya jika ada perempuan yang sifat peran mirip atau hampir sama dengan laki-laki, maka perempuan tersebut langsung di beri gelar sebagai perempuan yang kurang baik alis tomboy.

Perbedaan lain sebagai manusia yang secara biologis dan karena kodratnya yang harus diterima sejak mereka lahir adalah, laki-laki terlahir memakai zakar (penis) dan ketika beranjak dewasa biasanya anak laki-laki akan berubah suaranya, bahkan ada yang berkumis, berjenggot, sementara perempuan terlahir dengan vagina, dan ketika beranjak dewasa memiliki payudara (buah dada) dan siap untuk menjadi seorang ibu ketika dia mengalami menstruasi, laki-laki memancarkan sperma sementara perempuan mempunyai indung telur yang siap untuk dibuahi dari sperma laki-laki, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan secara alami juga sangat mempunyai hubungan ketergantungan,

---

<sup>19</sup>Kamla Bhasin, *Memahami Gender* ( Jakarta: Teplek Press, 2002), 23.

<sup>20</sup>Hasbi Yatim, *Disertasi, Pendidikan Lingkungan Berwawasan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: PTIQ, 2019)

artinya kedua saling membutuhkan. Hal ini semua menjadi kodrat alam yang tidak bisa dibantah.

Kaum laki-laki dianggap sebagai kaum yang kuat sehingga dia bisa berperan di sektor publik, sementara kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan hanya boleh berperan sebagai urusan domestik,<sup>21</sup> Perempuan dengan kelembutan yang dimiliki sangat cocok untuk menjadi pengasuh anak-anak di rumah, sementara laki-laki yang digolongkan sebagai kaum yang kuat cocok berperan di luar rumah, berfungsi untuk mencari nafkah buat keluarga, menjadi pelindung untuk keluarga.

Penentuan peran dalam teori ini sangat cenderung melihat kodrat manusia secara alamiah, peran tersebut mutlak diperlukan karena dengan peran tersebut keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan, hal itu terbukti pada kehidupan masyarakat tradisional di pedesaan. Dalam masyarakat tradisional tersebut, diakui bahwa kaum laki-laki harus berperan di sektor publik, sementara kaum perempuan hanya berperan di sektor domestik, kebiasaan tersebut diakui secara turun temurun serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai teori alamiah masyarakat yang mewariskan budaya tersebut juga diterima dengan baik oleh generasi berikutnya tanpa ada bantahan.

## 2. Teori Kebudayaan (*Nurture*)

Teori *nurture* sebenarnya merupakan “bantahan” teori ini disebut teori kebudayaan karena memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya, teori ini tidak setuju kalau dikatakan bahwa pemilahan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam. Faktor biologis tidak menjadi alasan atau penyebab keunggulan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, Identitas pemilihan keunggulan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan disebabkan karena elaborasi kebudayaan baik secara psikologis maupun secara sosial yang berarti secara historis atau budaya dari masing-masing jenis.<sup>22</sup> Dengan

---

<sup>21</sup>Arif Budiman, *Pembagian kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat* ( Jakarta: Gramedia, 1985), 12.

<sup>22</sup>Ibid.,

demikian apa yang disebut sebagai sifat kelaki-lakian dan keperempuanan (kewanitaan) merupakan hasil konstruksi melalui kebudayaan, bahkan boleh dikatakan bahwa terjadinya perbedaan kekuatan peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan melalui bagaimana proses pendidikan yang dilalui oleh kedua jenis tersebut. Betapa banyak kaum laki-laki jika dilihat sepintas lalu mempunyai badan yang kekar dan kuat, namun tidak mampu mengerjakan sesuatu, dan betapa banyak perempuan yang kelihatannya dari segi faktor biologi tidak kuat namun setelah mengerjakan pekerjaan tertentu lebih kuat dibanding dengan laki-laki.

Terjadinya pembagian peran sosial antara kaum laki-laki dan kaum perempuan mengikuti kebudayaan dimana mereka berada. Konstruksi kebudayaan pada suatu tempat belum tentu bisa berlaku pada masyarakat yang lain, dengan demikian secara universal tidak boleh dipaksakan suatu kebudayaan dapat diikuti secara pasti pada masyarakat yang lain. Pada masyarakat agraris kelihatannya yang lebih menonjol perannya adalah kaum laki-laki dibanding dengan kaum perempuan, oleh karena itu menurut pandangan Budiman terjadi perbedaan peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan hal yang disengaja. Secara empirik diketahui laki-laki sering memertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperebutkan dan memperoleh kekayaan dengan jalan mungkin berkelahi, berperang, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Dari kondisi seperti itu lahir peran sebagai orang yang memiliki akses yang lebih luas dibandingkan dengan perempuan yang lemah lembut.<sup>23</sup>

Teori kebudayaan yang memandang gender sebagai produk budaya, yang membedakan peran sosial antara kaum laki-laki dan kaum perempuan telah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat. Dan hampir semua pejuang gender berpendapat bahwa gender bukan kodrat, tetapi gender adalah hasil dari produk budaya yang dihasilkan secara turun temurun. yang dimiliki oleh anak perempuan, tetapi hal itu tidak terjadi.

## **METODE**

---

<sup>23</sup>Ibid.,

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartono dalam buku Pengantar Metodologi Research Sosial sebagaimana dikutip Sari et. al, mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. Karena menggunakan penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relevan dengan topik yang diangkat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila, *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masyarakat Covid19*, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappe-sona/article/download/830/562>.

## HASIL

### Konsep Gender Terhadap Pembangunan

Walaupun mencuatnya isu gender lebih disebabkan kerana gertakan dari kaum feminisme, namun pembangunan tetaplah hal yang universal. Oleh karena itu, bila tuntutan tersebut hanya mengacu pada substansi perempuan, maka akan menjadi pertanyaan balik bagi kaum laki-laki, kaum laki-laki akan menuntut hal yang sama. Oleh karena itu, maka gender merupakan suatu hal yang harus dipandang secara keseluruhan dalam pembangunan.<sup>25</sup>

Apabila dibayangkan, hubungan antara gender dengan pembangunan terasa masih membingungkan. Padahal, bagaimanapun metode dan konsep pembangunan pasti akan diikuti atau berpengaruh pada kehidupan baik spesifik pada laki-laki, perempuan, atau keduanya. Oleh karena itu, pembahasan gender dengan pembangunan bukanlah hal yang dapat diapresiasi dengan sikap skeptis. Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari adanya pembangunan. Substansi dari kesejahteraan salah satunya dengan adanya keadilan. Keadilan sendiri bukanlah hal yang dapat dengan mudah diperhitungkan secara matematis.

Keadilan dalam ekonomi belum dapat dikatakan sebagai kesimpulan keadilan, melainkan baru sebatas substansi keadilan. Untuk itu, aspek manusia tidak dapat diabaikan, karena sudah hakekat manusia sebagai homo politicus. Lantas, pertanyaan yang muncul adalah tentang bagaimana cara pembenahan bila dari segi manusia dalam bersosial tidak ada kesejahteraan?. Mencoba mendalami

---

<sup>25</sup>Hasanah dan Musyafak, *Gender And Politics*, 409-432.

isu ini, maka muncul pertanyaan baru, yakni apakah pembangunan yang tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan mengabaikan atau hanya sekilas mengintip masalah gender? Inilah yang selalu dipertanyakan dan dituntut oleh para aktivis gender, khususnya kaum feminisme.<sup>26</sup>

Melihat fakta yang ada selama ini ada, memang dapat dirasakan bahwa pembangunan yang dilakukan hanyalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak kapitalis. Kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari pembangunan dirubah menjadi unsur pembangunan. Pembangunan sampai dewasa ini lebih me- ningkatkan dari segi infrastruktur dan ekonomi. Sektor keseimbangan dalam halini gender kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan bahwa terdapat suatu penyimpangan dalam konsep pembangunan.

Akibatnya adalah gender mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Maka terciptalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender dalam pembangunan.<sup>27</sup>

Lalu, benarkah jika perempuan termarginalkan dalam pembangunan? Isu ini muncul akibat proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Peran perempuan pada urusan domestik. Beberapa artikel, jurnal, buku menyebutkan bahwa perempuan dalam pembangunan selama ini termarginalkan. Fakih dalam Hasanah dan Musyafak menjelaskan ketidakadilan gender tersebut antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) *stereotype* perempuan, 4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional. <sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid.,

<sup>27</sup>Afriandi Setiawan, dkk, Gender dan Pembangunan, dalam [https:// arificintaselviah.wordpress.com/kuliah / teori-pembangunan/ gender-dan pembangunan/](https://arificintaselviah.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/). Diakses 28 Mei 2022.

<sup>28</sup>Hasanah dan Musyafak, *Gender And Politics*, 409-432.

Isu ini, melahirkan pendekatan awal mencakup penargetan perempuan dalam perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada perempuan sebagai kelompok terpisah. Hal ini biasa disebut sebagai *Women In Development - WID* dan *Women And Development- WAD*. Kritik terhadap pendekatan ini menuding bahwa pendekatan ini tidak mengurus soal laki-laki, yang lalu mendorong munculnya model yang disebut *Gender And Development-GAD*), yang lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuan dari GAD adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama.

Maka dari itu pendekatan kesetaraan gender adalah mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.<sup>29</sup>

Strategi ini disebut Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai Daerah. Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya atau strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk terselenggaranya

---

<sup>29</sup>Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 202-209.

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pem- bangunan nasional yang berperspektif gender.<sup>30</sup>

### **Posisi Perempuan dalam Sektor Ekonomi Negara**

Sebelum Islam, kelahiran seorang wanita tidak disukai sebagai kemalangan besar. Pembunuhan terhadap perempuan adalah hal biasa di masyarakat Arab Jahiliyah, dengan bayi perempuan dikubur hidup-hidup tak lama setelah lahir. Ini adalah praktik orang Arab sebelum kedatangan Islam, yang terkenal kejam. Namun ketika Islam datang, diangkatlah derajat perempuan oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>31</sup>

Perempuan, menurut Yusuf, dalam Haryanto menjadi bintang pembangunan ekonomi baru karena semakin banyak perempuan yang terjun ke dunia usaha dalam skala mikro, menengah, dan besar. studi yang mencoba menghubungkan bias gender dengan subkultur seperti asal daerah, etnis, dan praktik keagamaan dalam konteks budaya nasional yang memengaruhi kewirausahaan di negara berkembang Hasilnya, ditemukan bahwa gender, etnis, dan agama semuanya memainkan peran penting dalam pengembangan kewirausahaan. Pengusaha wanita memiliki tempat di dunia bisnis. Kewirausahaan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempertahankan hidup dan kemandirian seseorang.<sup>32</sup> Hal itu memerlukan kebijakan baru yang bertujuan menghilangkan deskriminasi gender akibat praktik budaya lokal yang selama ini menghambat peran perempuan

Peranan dan kontribusi para perempuan (istri) dapat dilihat dari banyaknya waktu yang dicurahkan untuk setiap kegiatan yang dilakukan baik

---

<sup>30</sup>Waston Malau, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan", Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 6 (2) (2014): 125-131, 3-6.

<sup>31</sup>Siti Nurjannah dan Siti Aisyah, *Gender: Kedudukan Perempuan Dalam Sektor Ekonomi Negara Perspektif Islam*, dalam [https:// www. researchgate. net/ publication /333931255](https://www.researchgate.net/publication/333931255), Diakses 25 Mei 2022.

<sup>32</sup>Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2015), 129.

pada kegiatan produktif, reproduktif, maupun kegiatan sosial. Kegiatan produktif terkait curahan waktu perempuan/istri yakni sekitar 217 jam per bulannya, sedangkan suami 312 jam per bulannya. Kegiatan reproduktif curahan waktu istri 10 jam per harinya, sedangkan suami rata-rata 2 jam per harinya. Kegiatan sosial curahan waktu istri lebih dari 19 jam per bulannya, dan curahan waktu suami rata-rata 15 jam per bulannya.<sup>33</sup>

Studi Rebecca Joseph memperlihatkan bahwa perempuan bekerja dalam seluruh sektor ekonomi industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnya. Walaupun demikian, jumlah kerja perempuan tersebut sering di kritik karena tidak sesuai dengan kenyataan sebab pekerjaan di luar rumah yang dimasukkan kedalam statistik dan mengabaikan kenyataan bahwa perempuan juga banyak yang bekerja didalam lingkungan rumah. Kerja rumahan dipilih sebagai contoh, karena sangat cocok untuk menunjukkan penggenderan dalam kerja perempuan, dimana struktur sosial, gambaran ideologi dan bentuk akumulasi bergabung dalam suatu lingkungan yang dianggap feminim.<sup>34</sup>

Di Indonesia, pemikiran Kartini membuka jalan bagi berdirinya beberapa organisasi khusus perempuan, seperti organisasi profesi untuk perempuan. Sejak saat itu, wanita Indonesia mengalami periode demi periode. Mereka juga berjuang dengan berbagai cara di dalam gerakan perempuan. Menyusul proklamasi kemerdekaan, mereka dan organisasinya masing-masing berkolaborasi dengan para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Namun, kemerdekaan politik bagi bangsa dan negara belum, dalam tatanan sosial yang mau menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara.

### **Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mandiri**

#### **1. Pengertian Ekonomi Mandiri**

Kemandirian adalah sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri untuk mengatasi berbagai masalah guna mencapai satu tujuan dengan tetap

---

<sup>33</sup>Eko Ariwidodo, *Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumput Laut Di Bluto Kabupaten Sumenep*. Jurnal Nuansa :jurnal penelitian ilmu sosial dan keagamaan Islam. Volume 13. No.2 Juli-Desember 2016, 332.

<sup>34</sup>Liza Hadiz, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2004), 200.

terbuka terhadap berbagai peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Ekonomi mandiri adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mengatur mekanisme penghidupan pelaku ekonomi dalam rangka kehidupan bermasyarakat (gotong royong) berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menerapkan prinsip, tetapi berbasis swadaya. Diklaim juga bahwa ekonomi mandiri dikelola oleh kantor pusat di setiap kecamatan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan panutan masyarakat.<sup>35</sup>

Konsep kemandirian tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia (kelompok, komunitas), kemandirian juga bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*).<sup>36</sup> Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga muncul suatu keseimbangan.

## 2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mandiri

Saat ini terdapat beberapa permasalahan dalam upaya ekonomi masyarakat, antara lain terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendanaan, dan terbatasnya kapasitas.

### a. Kebijakan Pertanian

Khususnya kebijakan pemerintah yang mempermudah masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah ulayat, yang dapat membantu

---

<sup>35</sup>Sukirman, dan Mamik Indaryani, *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan Manajemen Profesional* <https://jurnal.um-palembang.ac.id>, Diakses 22 Mei 2022

<sup>36</sup>Mukeri, *Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa*, [http://jurnal.unpand.ac.id > article](http://jurnal.unpand.ac.id/article) , Diakses 22 Mei 2022

perekonomian masyarakat. Konversi lahan masih menjadi masalah utama di sektor pertanian Indonesia, dan luas lahan negara ini menyusut sebagai akibat dari konversi lahan.<sup>37</sup> Jika pemerintah mengakui hak kepemilikan hutan adat, masyarakat adat setempat akan dapat mendirikan Perusahaan Hutan Kemasyarakatan dan Perusahaan Perkebunan Rakyat.

b. Sarana Produksi Pertanian

Pengadaan sarana produksi pertanian skala kecil menaikkan harga per unit sarana produksi. Akibatnya, biaya produksi per unit produk menjadi tinggi. Produksi dan keuntungan yang kecil akan menjadi penghambat akumulasi kapital di setiap unit produksi.<sup>38</sup> Dengan skala usaha kecil-kecil dengan jumlah jutaan dan antara satu sama lain tidak ada keterkaitan, akan menyebabkan posisi tawar merek, baik di pasar input maupun di pasar output, sangat lemah. Oleh sebab itu melalui merger antar unit usaha pertanian atau *cooperate farming*, dapat menjadi jalan keluar yang relatif baik untuk masalah tersebut. Melalui *cooperate farming* (CF), produksi pertanian dilakukan melalui unit-unit perusahaan pertanian yang saham seluruhnya dimiliki oleh petani yang bersangkutan.

c. Infrastruktur Dasar

Peran swasta dalam pembangunan sarana pertanian harus menemukan skema yang saling menguntungkan untuk menarik sektor swasta. Menurut Khudori tentang pendirian bank harus didukung setelah didirikan, bank pertanian dapat diarahkan untuk membiayai infrastruktur pangan. Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menopang kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang perlu dilakukan, mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang minim aksesibilitas, sehingga akses masyarakat terhadap produk unggulan masih terbatas. Infrastruktur, di sisi lain, merupakan faktor penting dalam menarik

---

<sup>37</sup>Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, dan Kahar Lahae, *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan*, *Mulawarman Law Review* Vol. 6 Issue 1 (2021), 15-31

<sup>38</sup>Mubyarto, *Reformasi, teori Ekonomi dan Kemiskinan*, *Journal Of Indonesian Economy and Bussines* Vol. 19 No. 2 tahun 2004.

investor untuk menawarkan modalnya, terutama dalam hal potensi dan strategi daerah.<sup>39</sup> Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan sejumlah inisiatif dan program terkait infrastruktur, antara lain:a) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/ kota b) Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih c) Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra- sentra produksi d) Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman e) Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik.

#### d. Permodalan

- 1) Alokasi Anggaran untuk KUR Salah satu bentuk dari memberdayakan ekonomi rakyat yang mandiri adalah dengan memberikan akses permodalan yang mudah khususnya kepada pelaku ekonomi rakyat mandiri. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan, karena semakin mudah akses untuk meminjam uang untuk modal usaha di lembaga keuangan maka UMKM semakin terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan formal dan pembelajaran bagi UMKM untuk mandiri dan efisien.
- 2) Kebijakan Perpajakan Untuk mendorong UMKM bergabung pada koperasi (baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri) maka UMKM yang bergabung diberi keringanan pajak.
- 3) Kebijakan Upah Tinggi rendah nya upah dan gaji yang diterima ditentukan dari kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga sikap mental (etos kerja, profesionalitas, dan kedisiplinan).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Darmawanto, *Tesis: Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)* (Semarang: Undip, 2008)

<sup>40</sup>Ashari, *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 7 No. 1, Maret 2009 : 21-42 .

e. Teknologi

Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Salah satu yang mempengaruhi pembangunan dan perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi.<sup>41</sup>

Teknologi adalah bagaimana faktor-faktor produksi dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan-tujuan produksi. Sementara itu yang dimaksud dari perubahan teknologi adalah perubahan fungsi produksi dalam kegiatan tertentu, yang menyebabkan bertambahnya produksi sama dengan jumlah dan sumber produksi, tetapi jumlah sumber lebih sedikit sehingga teknologi merupakan upaya menciptakan barang cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini Perkembangan Indonesia cukup pesat. Sumbangan modal terhadap pendapatan nasional diperkirakan mencapai 75%, sedangkan sumbangan tenaga kerja dibawah 20% dan ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja rendah.<sup>42</sup>

3. Pemasaran

Globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Globalisasi yang dilandasi konsep perdagangan bebas, memungkinkan banyak barang dari negara lain masuk ke Indonesia dan menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih produk luar negeri yang kualitas dan gengsinya dapat mengikis rasa nasionalisme kita saat membeli barang. Sulit bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan produk luar negeri. Pemerintah dapat melaksanakan program ekonomi kreatif. Produk dari negara lain.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Daniel Sitindaon, *Skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Demak*, (Semarang: Unes, 2013).

<sup>42</sup>Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan Program Pascasarjana Universitas Andalas, PROSIDING “Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa–Kota” SEMINAR NASIONAL Universitas Andalas Padang, 23-24 November 2016, ISBN : 978-602-73463-1-4.

<sup>43</sup>Marinus R. Manurung, *Moral Dan Etika Dalam Dunia Bisnis Menjelang Pasar Bebas*, Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi, 1-35.

Strategi pemberdayaan untuk mengembangkan ekonomi rakyat mandiri agar dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan pada usaha rakyat kecil serta mendukung setiap usaha mikro yang ada di Indonesia dengan berlakunya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kemudahan usaha rakyat dalam mendapatkan pinjaman di lembaga lembaga keuangan yang bersangkutan.

### **Hubungan Kesetaraan Gender dengan pertumbuhan ekonomi**

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal biasa sepanjang tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan gender terjadi semakin luas dan menyelimuti hampir semua kelompok perempuan? Sejumlah faktor ditenggarai sebagai penyebab dan yang paling mengemuka adalah tiga faktor utama: pertama dominasi budaya patriarkal. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kepentingan laki-laki. Kedua, interpretasi ajaran agama sangat didominasi oleh pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarkal. Ketiga, hegemoni Negara yang begitu kuat.<sup>44</sup>

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marjinalisasi, kekerasan, subordinasi, stereotip dan beban ganda telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat. Pertama wujud dari ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada suatu negara maupun organisasi antar negara. Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan

---

<sup>44</sup>Siti Nurul Khaerani, *Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Qawwām Volume 11 Nomor 1, Juni 2017, 59-76.

yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. Kedua, wujud dari ketidakadilan ini juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, dan kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, dalam adat istiadat di banyak kelompok etnik masyarakat, kultur suku-suku maupun dalam tafsiran keagamaan wujud ketidakadilan gender ini pun terjadi. Keempat, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Mulai dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, hingga interaksi antara anggota keluarga, di dalam banyak rumah tangga sehari-hari asumsi bias gender ini masih digunakan. Kelima adalah ketidakadilan gender yang sudah mengakar di dalam suatu keyakinan dan menjadi ideologi bagi kaum perempuan maupun laki-laki, hal seperti ini sudah sangat sulit diubah.<sup>45</sup>

Adanya ketidakadilan gender dalam bentuk apapun baik berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda yang dilakukan baik dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga maupun yang lebih besar yaitu negara akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena adanya ketidakadilan merupakan bagian dari tidak tercapainya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, akan tetapi sering kali pembakuan peran gender yang terjadi di masyarakat sangat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk itu perlu diwujudkan adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

---

<sup>45</sup>Ibid.,

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender maka perlu diwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

Kebijakan pembangunan yang mempertinggi perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan cenderung memburuk kesenjangan penghasilan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan di dalam rumah tangga. Karena program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sering kali lebih dikhususkan kepada laki-laki, sedangkan program perluasan pertanian mengutamakan budidaya pertanian yang didominasi laki-laki yang seringkali sering mengorbankan lahan bagi perempuan untuk bercocok tanam sayuran. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan justru lebih memperberat beban kerja perempuan dan pada saat yang sama mengurangi bagian sumber daya rumah tangga yang dapat mereka kendalikan. Akibatnya, kaum perempuan dan orang-orang yang bergantung pada mereka tetap menjadi kelompok yang secara ekonomis paling rentan di negara-negara berkembang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Ibid.,

Menurut Prof.Simon Kuznets dalam M.L. Jhingan mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan dalam jangka panjang dalam memampukan suatu negara. Pengertian ini mempunyai tiga komponen : pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terwujud dari ketersediaan akan terhadap barang-barang selalu tersedia ; kedua, melihat jaman yang semakin canggih akan teknologi merupakan factor peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat memudahkan berbagai macam dalam melakukan pekerjaan di kalangan publik; ketiga, penggunaan teknologi dalam kelembagaan dan pemahaman dapat dihasilkan secara mudah, cepat dan tepat, contoh : corak kehidupan desa dan kota, pola dalam keluarga. <sup>47</sup>

Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana meningkatkan muatan dalam berproduksi di kegiatan perekonomian secara berulang kali atau sepanjang waktu sehingga menghasilkan sejumlah penghasilan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu; pertama,pembentukan sejumlah modal, yaitu seluruh investasi pemasukam baru baik itu berupa tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui beberapa bidang kesehatan, pendidikan, dan kemampuan dalam bekerja; kedua, Bertambahnya jumlah penduduk pada akhirnya akan mendorong terjadinya pertumbuhan angkatan kerja; ketiga, Kemajuan teknologi yang semakin canggih merupakan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan.<sup>48</sup>

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tanpa adanya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Akibatnya, penelitian Alvares dan Lopez mengungkapkan bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah isu tentang kondisi manusia dan indikator dalam pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan kesetaraan gender berarti melakukan investasi dalam modal fisik (*physical capital*). Insentif dalam investasi dihasilkan melalui expected rate of return pada investasi. Semakin produktif sebuah angkatan kerja (*employment*) dan pendidikan akan meningkatkan

---

<sup>47</sup>Desi Mariaty Padang, Ali Anis, dan Ariusni, *Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan , Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019, 969 - 976

<sup>48</sup>Ibid.,

expected rate of return sebuah investasi. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Hubungan Kesetaraan Gender dengan Pertumbuhan Ekonomi.<sup>49</sup>

Secara umum, kesetaraan gender dapat menguntungkan prospek pembangunan ekonomi dan sangat membantu standar hidup seseorang. Namun hubungan antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi bekerja dua arah yaitu peningkatan penghasilan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan perempuan serta kesetaraan gender. Kegiatan ekonomi yang lebih giat dapat meningkatkan kesetaraan gender melalui beberapa cara yaitu pembangunan ekonomi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas pekerja dipasar kerja serta mendorong munculnya pasar kerja di tempat yang sebelumnya tidak ada. Perkembangan ini bisa menghapus beberapa ketidakefisienan ekonomi serta meningkatnya keterlibatan ekonomi laki-laki maupun perempuan.<sup>50</sup>

Pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan meningkatnya investasi prasarana seperti air bersih, jalan raya, transportasi, dan bahan bakar. Investasi dan pembangunan pasar kerja pengganti seperti dapat mengurangi kerja tanpa bayar perempuan sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh waktu senggang atau untuk bekerja mencari penghasilan dan juga menghapus pemisahan gender dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Ketika penghasilan keluarga meningkat, kesenjangan gender dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi cenderung menurun. Keluarga berpenghasilan rendah yang terbiasa menghemat anggaran pendidikan, kesehatan dan gizi akan menambah pengeluaran untuk hal-hal tersebut. Dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan umum (seperti klinik kesehatan, sekolah dan jalan), maka pembangunan ekonomi juga menurunkan biaya investasi modal bagi setiap rumahtangga.

---

<sup>49</sup>Ibid.,

<sup>50</sup>Ibid, 969 – 976.

Klasen dan Lamanna mengemukakan bahwa dengan pendidikan yang lebih baik, perempuan dapat melakukan aktivitas ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif dan kesetaraan gender dalam pendidikan melalui peningkatan dalam insentif dan kesempatan dalam mendidik perempuan. perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi juga cenderung mempunyai anak yang lebih sedikit. Penurunan dalam fertilitas juga berasosialisasi dengan kesetaraan gender yang lebih baik dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>51</sup>

Klasen menemukan bahwa ketimpangan gender dalam bidang pendidikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Status ekonomi yang rendah akan menyebabkan wanita dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi yang terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya. Peran ganda yang tidak sepenuhnya dimengerti dan dihargai menyebabkan wanita jatuh pada lokasi kelelahan fisik mental tanpa dukungan yang memadai dari sekitarnya. Hal ini akan melemahkan status kesehatan dan peranannya dalam pembangunan kehidupan keluarga maupun masyarakatnya. Keterjangkauan dan mutu upaya kesehatan dengan terjangkau luas serta bermutu akan menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat seperti bidan yang ditempatkan di desa atau posyandu yang memberikan perhatian lebih bagi ibu dan anak.<sup>52</sup>

Status ekonomi yang rendah akan menyebabkan wanita dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi yang terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya. Peran ganda yang tidak sepenuhnya dimengerti dan dihargai menyebabkan wanita jatuh pada lokasi kelelahan fisik mental tanpa dukungan yang memadai dari sekitarnya. Hal ini akan melemahkan status kesehatan dan peranannya dalam pembangunan kehidupan keluarga maupun masyarakatnya. Keterjangkauan dan mutu upaya kesehatan dengan terjangkau luas serta bermutu akan menjamin pemeliharaan

---

<sup>51</sup>Erma Aktaria dan Budiono Sri Handoko, *Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, 194-206

<sup>52</sup> Ibid.,

kesehatan masyarakat seperti bidan yang ditempatkan di desa atau posyandu yang memberikan perhatian lebih bagi ibu dan anak.<sup>53</sup>

Pasar dapat menunjukkan beberapa kesuksesan dalam kegiatan perekonomian. Tetapi kesuksesan tersebut tidak memungkinkan bahwa terjaminnya suatu kesetaraan gender. dalam mewujudkan kesetaraan tersebut maka diperlukan adanya perhatian yang serius untu mengatasi kesenjangan pasar yang dapat mempengaruhi kesetaraan gender melalui kegiatan konsumsi, pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran perkapita yaitu kontribusi

Salah satu makna kesetaraan gender adalah adanya kesamaan akses, termasuk didalamnya lapangan pekerjaan. Di Indonesia nyaris semua lapangan pekerjaan bisa diakses oleh perempuan. Mulai dari pekerja “kasar” seperti pekerja bangunan hingga presiden. Desakan ekonomi salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja, mereka kadang terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun tidak sedikit perempuan yang bekerja karena memang mereka menginginkan menjadi wanita karir untuk menunjukkan eksistensinya. pendapatan yang diperoleh antara laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>54</sup>

## **KESIMPULAN**

Untuk mencegah ketidaksetaraan gender, perlu diupayakan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender terwujud ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat yang sama dan adil dari pembangunan. Partisipasi dan akses menyiratkan kemampuan untuk menggunakan sumber daya serta wewenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan hasilnya.

---

<sup>53</sup>Darmawati dan Anggriani Alamsyah, *Gender Dan Ekonomi (Analisa Terhadap Mitra Go-Jek Perempuan Di Indonesia Tahun 2018)*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 12 Nomor: 1 ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367, 1-19.

<sup>54</sup>Ibid.,

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul. *Peran Perempuan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Gender*, <http://ejournal.kopertais4.or.id> › article, Diakses 25 Mei 2022.
- Ariwidodo, Eko. *Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumput Laut Di Bluto Kabupaten Sumenep*. Jurnal Nuansa :jurnal penelitian ilmu sosial dan keagamaan Islam. Volume 13. No.2 Juli-Desember 2016.
- Ashari. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 7 No. 1, Maret 2009.
- Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan Program Pascasarjana Universitas Andalas, PROSIDING “Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa–Kota” SEMINAR NASIONAL Universitas Andalas Padang, 23-24 November 2016, ISBN : 978-602-73463.
- Bhasin, Kamla. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplek Press, 2002.
- Budiman, Arif. *Pembagian kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Darmawanto. *Tesis: Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)*. Semarang: Undip, 2008.
- Darmawati dan Anggriani Alamsyah. *Gender Dan Ekonomi (Analisa Terhadap Mitra Go-Jek Perempuan Di Indonesia Tahun 2018)*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume: 12 Nomor: 1 ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367.
- Desi Mariaty Padang, Ali Anis, dan Ariusni. *Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan , Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019.
- Erma Aktaria dan Budiono Sri Handoko. *Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 2, Desember 2012.
- Hadiz, Liza. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2004.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2015.

Hermanto. *Proses Pembelajaran Quantum Teaching Dalam Bahasa Inggris Pada Kelas Co-Education Berbasis Adil Gender*, Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017 P-ISSN: 1412-2715, E-ISSN: 2616-4412.

Indrayati, Susi. *Mendudukan Wacana Gender (Dari Kesalahpahaman Menuju Pemahaman)*, MUWĀZĀH, Volume. 4, Nomor. 2, Desember 2012.

Ivan, Illich. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, dan Kahar Lahae. *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan*, Mulawarman Law Review Vol. 6 Issue 1 (2021).

Khaerani, Siti Nurul. *Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Qawwām Volume 11 Nomor 1, Juni 2017.

Malau, Waston. “*Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*”, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 6 (2) (2014).

Manurung, Marinus R. *Moral Dan Etika Dalam Dunia Bisnis Menjelang Pasar Bebas*, Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi.

Marzuki. *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, Jurnal Civics Vol. 4 No. 2 Desember 2007.

Mokodompis, Anistasya. *Skripsi: Analisis Kosa Kata Yang Berhubungan Dengan Gender Dalam Bahasa Inggris Dan Bahas Sangir ((Suatu Analisis Kontrastif)*, (Manado, UNSRAT, 2020).

Mosse, Julia Cleves. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Mutawakkil, M. Hajir . *Keadilan Islam dalam Persoalan Gender*, UNIDA Gontors Journal, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Mubyarto. *Refromasi, teori Ekonomi dan Kemiskinan*, Journal Of Indonesian Economy and Bussines Vol. 19 No. 2 tahun 2004.

Mukeri. *Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa*, <http://jurnal.unpand.ac.id> > article , Diakses 22 Mei 2022

Nazaruddin. *Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015.

- Nurjannah, Siti dan Aisyah, Siti. *Gender: Kedudukan Perempuan Dalam Sektor Ekonomi Negara Perspektif Islam*, dalam [https:// www. researchgate. net/ publication /333931255](https://www.researchgate.net/publication/333931255), Diakses 25 Mei 2022.
- Rahmawaty, Anita. *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, Palastren Vol. 8 No. 1 Juni 2019.
- Rosyad, Muh. Sabilar. *Analisis Buku Bahas Arab Siswa Kelas VIII MTs/SMP Islam Dalam Perspektif Gender*, JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education Volume 02, Nomor 02, September 2018; p-ISSN: 2549-7804; e-ISSN: 2549-8622.
- Setiawan, Afriandi dkk. *Gender dan Pembangunan*, , dalam [https:// arifcintaselveia.wordpress.com/kuliah / teori-pembangunan/ gender-dan pembangunan/](https://arifcintaselveia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/). Diakses 28 Mei 2022.
- Setiyawan, Agung. *Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, Jurnal Pendidikan Islam: Volume III, Nomor 2, Desember 2014/1436.
- Setyawati, Novita Wahyu dan Endah Prawesti Ningrum. *Peran Gender Dalam Pengambilan Keputusan Pada Era Reformasi Di Institusi Kepolisian*, JURNAL M-PROGRESS Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Sitindaon, Daniel. *Skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Demak*. Semarang: Unes, 2013.
- Sukirman, dan Mamik Indaryani. *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan Manajemen Profesional* <https://jurnal.um-palembang.ac.id>, Diakses 22 Mei 2022
- Syamsiah, Nur. *Wacana Kesetaraan Gender, Sipakalebbi'* , Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak. *Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017.
- Wahyudi, Dedi Dkk. *Diskursus dan Penguatan Gender Dalam Pendidikan Islam*, JSGA Vol. 02 No. 02 Tahun 2020.
- Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila,. *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada*

*Masadarurat Covid19*, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappe/sona/articledownload/830/562>.

Wirasandi. *Wanita Dalam Pendekatan Feminisme*, Journal Ilmiah Rinjani\_Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No.2 Tahun 2019.

Yatim, Hasbi. Disertasi, *Pendidikan Lingkungan Berwawasan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: PTIQ, 2019.

Zubeir, Rusdi. *Gender Dalam Perspektif Islam*, AN NISA'A, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2012.

Zuhaeni, Dzuhayatin Siti. *Idiologi Pembebasan perempuan Perspektif Femenisme Dalam Islam yang dilansir oleh Binar*, Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan. Jakarta: Cides UI, 1998.